



Pembelajaran PKN Berkarakter di Mi Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

Ilham¹, Nur Rohman²

¹Program Studi pendidikan Agama Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

²Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: ilham.aceh86@gmail.com¹, nur.rohman@staindirundeng.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi pembelajaran PKN berkarakter di MI Nurul Ummah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap aspek-aspek yang memiliki hubungan dengan pola manajemen dalam pembelajaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PKN berkarakter dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yakni: (1) tahapan perencanaan yang meliputi perumusan silabus dan RPP sesuai dengan pendidikan karakter yang ditanamkan, (2) tahap pelaksanaan pembelajaran yang dirangkai dalam dua metode yaitu; metode keteladanan dan pembiasaan. (3) tahap evaluasi berisi penilaian seluruh aktivitas pembelajaran dimulai dari tahap perencanaan hingga implementasi pembelajaran

Kata Kunci: *Pembelajaran PKN, Pendidikan Karakter*

Abstract

This study aims to analyze the extent of the implementation of PKN learning in character at MI Nurul Ummah Yogyakarta. This research uses qualitative descriptive research with data collection methods through observation, interviews and documentation of aspects that have a relationship with management patterns in learning. The results showed that the implementation of character PKN learning was carried out based on several stages, namely: (1) planning stages which include the formulation of the syllabus and rpp in accordance with the character education instilled, (2) the stages of implementing learning which are assembled in two methods, namely; exemplary and habituation methods. (3) the evaluation stage contains an assessment of all learning activities starting from the planning stage to the implementation of learning

Keywords: *PKN Learning, Character Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Fitriyani, 2018) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Wahono, 2018).

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (FITRIA, 2011) yaitu berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Rohman et al., 2022).

Secara yuridis istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 39 undang-undang tersebut menyatakan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (R. Indonesia, 1989).

Selanjutnya, Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat (Nasution, 2017) dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nurjanah et al., 2021). Namun pada kenyataannya, alih-alih mewujudkan tujuan-tujuan mulia tersebut Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya di era Orde Baru, telah dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara indoktrinasi nilai-nilai Pancasila dan manipulasi terhadap makna sebenarnya demokrasi (Darmadi, 2020).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, MI Nurul Ummah juga menjalankan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkarakter. Hal ini dibuktikan dengan setiap pembelajaran seorang guru khususnya di kelas VI terus mencoba untuk memunculkan nilai yang terkandung dan nilai yang diharapkan dari pembelajaran tersebut. Dalam mengajarkan PKN berkarakter, seorang guru menggunakan acuan berupa buku guru dan buku siswa serta menggunakan buku-buku lain yang sejalan dengan materi yang sedang diajarkan dan juga yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang mereka terapkan. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran, seorang guru biasanya menggunakan model pembelajaran *cooperatif learning* yang berupa pembagian kelompok- kelompok kecil dalam kelas, serta media yang digunakan dapat berupa media gambar serta media-media pendukung lainnya.

Sebagai penguat penelitian kali ini, peneliti juga telah menganalisis beberapa karya ilmiah yang serupa. Diantara penelitian tersebut adalah Integrasi Pendidikan Karakter Ke Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar yang dilakukan oleh Kurniawan dengan memperoleh hasil (1) Nilai-nilai karakter yang sesuai diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn SD, yaitu: Peduli sosial, cerdas, cinta tanah air, demokratis, disiplin, jujur, kerja keras, menghargai prestasi, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, tanggung jawab, dan toleransi; (2) Pengintegrasian nilai karakter kedalam perangkat pembelajaran PKn SD dilakukan dengan cara memahami substansi SK dan KD (Kurniawan, 2013)

Penelitian terkait selanjutnya dilakukan oleh Karimah dengan judul penelitian "Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Madrasah Salafiyah Ibtidaiyah". Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil berupa penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKN dilakukan berdasarkan empat tahapan yakni: tahap perencanaan meliputi penyusunan RPP dan Silabus. (2) tahap pelaksanaan berupa pemilihan materi ajar, penerapan pembelajaran yang mencakup media dan metode pembelajaran yang digunakan, (3) tahap penilaian berupa pemberian tes, dan (4) penemuan solusi atas hambatan yang ditemui selama proses implementasi pembelajaran berlangsung (Karimah, 2015)

Selanjutnya, penelitian serupa juga dilakukan oleh Budi Juliardi dengan judul penelitian "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan". Dalam penelitiannya,

Juliardi menyoroti tentang merosotnya moral bangsa yang diakibatkan oleh berbagai hal. Untuk mengantisipasi kemerosotan tersebut, maka perlu adanya pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter salah satunya melalui pembelajaran PKN (Juliardi, n.d.)

Berdasarkan beberapa literatur review di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKN memiliki kaitan erat dengan pendidikan karakter. Hal ini mengingat setiap materi kajian yang disampaikan merujuk pada pendidikan karakter. Oleh karenanya pula, penelitian ini memosisikan diri sebagai pelengkap kajian tentang bagaimana integrasi pembelajaran PKN dengan pendidikan karakter di Madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian, kajian penelitian kali ini akan fokus pada bagaimana implementasi pendidikan PKN yang berkarakter di MI Nurul Ummah Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2013). Untuk mendapatkan data yang diinginkan berkaitan dengan tujuan penelitian maka dilakukan observasi, wawancara beserta dokumentasi (Rohman, 2021). Analisis data akan dilakukan secara berurut dan berkesinambungan dari pertama sampai dengan akhir penelitian, menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, kemudian simpulan. Untuk menetapkan keabsahan dari penelitian ini, diperlukan teknik pemeriksaan yakni kretibilitas, keteralihan, ketergantungan dan kemudian ketegasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran PKN yang Berakar

Dalam sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, No. 20, Pasal 37 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi wajib memuat "Pendidikan Kewarganegaraan" (UUD, 2003). Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud adalah untuk membentuk peserta didik/warga negara menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Mahardika, 2021) yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai ungkapan makna yang sama dalam arti memiliki atau dapat juga disebut bela negara. Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 yaitu untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pencapaian tujuan nasional tidak hanya cukup diwujudkan oleh setiap warga negara secara profesionalisme melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, demi pengabdianya terhadap negara, namun harus juga ditunjukkan melalui pola sikap dan perilaku kesadaran bela negara (Duryat, 2021) atau pola sikap dan perilaku yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan demikian, bela negara atau cinta tanah air pada prinsipnya adalah upaya bagaimana membangun keuletan dan ketanggunhan negara dan bangsa yang bersangkutan melalui kesadaran kolektif warga negaranya untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan baik yang timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Upaya berkelanjutan menumbuhkembangkan pola sikap moral dan watak kebangsaan dan pendidikan politik kebangsaan diharapkan dapat memantulkan dan terinternalisasinya pembentukan moral dan kepribadian anak bangsa atau warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang diekspresikan dalam pola sikap dan perilaku normatif sesuai dengan norma-norma kesadaran bela negara.

Selanjutnya, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dari kewarganegaraan dan tidak bisa tidak berangkat dari makna warga negara. Konsep kewarganegaraan

pada umumnya dipahami dalam konteks legal formil (Santika, 2021). Warga negara memahami dirinya sebagai pribadi-pribadi dan pihak-pihak yang otonom dalam suatu ikatan yang berdaulat, namun dikaitkan dengan warga negara NKRI, lebih tepatnya jika kewarganegaraan yang dalam artian citizen yang bermakna warga negara yang memiliki jiwa dan semangat publik (dalam kaitan dengan kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara).

Dalam pemahaman kewarganegaraan banyak variasi yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

1. Kewarganegaraan adalah pemberdayaan masyarakat atau warga negara dalam keterlibatannya atau keikutsertaannya (partisipasi secara aktif di dalam menata kehidupan komunitas politik, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sutrisman, 2019).
2. Kewarganegaraan dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, adalah penanaman pola sikap dan perilaku normatif bagi setiap warga negara untuk memiliki kepedulian terhadap kehidupan komunitas politiknya (kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) (Sadeli, 2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam hal ini merupakan upaya pembentukan moral dan kepribadian kebangsaan bagi anak bangsa dan warga negaranya untuk memiliki rasa kebangsaan dan mencintai tanah air (Kesadaran bela negara). Sesuai dengan makna yang tersirat dalam penjelasan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat 1: Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Pendidikan kewarganegaraan dalam hal seperti tersebut di atas sebagai salah satu perwujudan peningkatan /penguatan pemahaman lebih lanjut dari (kesadaran) upaya bela negara. Pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya berangkat dari pengembangan pembinaan jati diri/warga negaranya, senantiasa mengacu pada falsafah, ideologi dan wawasan kebangsaannya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewarganegaraan sebagai dimensi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yaitu hak politik, ekonomi dan hak sosial budaya (Basic rightsufficiency), termasuk hak rasa aman, sebagai ungkapan suatu ikatan yang berdaulat (sovereign compect).
5. Kewarganegaraan dikaitkan dengan upaya pencegahan/perbaikan (amelioration) terhadap terjadinya berbagai konflik berdasarkan perbedaan kelas atau kebhinekaan (pluralisme).
6. Kewarganegaraan (citizenship) dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai bagian dari proses upaya membangun cara hidup multicultural untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran bela negara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional (Hamidah, 2019). Jadi dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan adalah penanaman nilai cara hidup/pola sikap dan perilaku normatif atau keragaman sosial budaya (multikulturalisme) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka membentuk kekenyalan, kelenturan, dan ketahanan (resilience) mental bangsa dalam menghadapi bentm'an atau konflik lpoleksosbud.
7. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya (Setiawan, 2014).
8. Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship Education) merupakan suatu pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami

perkembangan sejarah yang sangat panjang, yang dimulai dari pendidikan Civics, Moral Pancasila, Kewiraan, Kewarganegaraan sampai dengan yang terakhir pada kurikulum 2004 berubah namanya menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan menurut Wirman Burhan adalah sebagai berikut:

1. Civics Knowledge, yaitu pengetahuan tentang kewarganegaraan yang berkaitan dengan politik, hukum, moral, budaya dan lain-lain.
2. Civics Skill, yaitu tentang keterampilan kewarganegaraan, peran serta dalam kehidupan bermasyarakat,
3. Civics Values, yaitu tentang nilai-nilai kewarganegaraan mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, percaya diri nilai keadilan, agama, demokrasi dan lain-lain (Kurniati et al., 2021)

Selanjutnya, penjelasan terkait nilai yang terkandung dalam kewarganegaraan dijelaskan secara rinci oleh Winarno (2013) dalam bukunya yang berjudul "Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; isi strategi dan penilaian" sebagai berikut:

1. Civics Knowledge, yaitu pengetahuan seseorang tentang dirinya terhadap negaranya baik yang berkaitan dengan politik, hukum, moral, budaya dan lain-lain. civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Adapun isi civic knowledge yang terkandung dalam PKN yang dijelaskan oleh Pusat Sistem Pengujian dan Pengembangan (PUSUIBANG) Depdiknas dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah sebagai berikut.
2. Manusia sebagai zoon politicon
3. Nilai, norma, dan moral.
4. Norma-norma dalam masyarakat.
5. Bangsa dan negara.
6. Konstiusi.
7. Lembaga-lembaga politik.
8. Kewarganegaraan.
9. Sistem politik demokrasi
10. Negara hukum dan penegakkannya
11. Hak asasi manusia (HAM).
12. Peran indonesia dalam hubungan internasional
13. Identitas nasional.

Selanjutnya, pada dasarnya nilai-nilai dalam PKN berkarakter merupakan upaya yang dilakukan untuk membentuk identitas nasional. Dengan adanya PKN berkarakter ini diharapkan peserta didik memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Karakter kebangsaan tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibiasakan dilatih secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh Soemarno Soedarsono yang menyatakan bahwa karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jatidiri masing-masing. Selanjutnya, apabila suatu negara ingin terus berkarakter maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyanggah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan luar.

Pembelajaran PKN Berkarakter di MI Nurul Ummah Yogyakarta

Idealnya implementasi sebuah program, tentu tahapan implementasi merupakan bagian utama yang perlu diketahui sebagai upaya melihat dan menganalisis implementasi program tersebut. Konsep tersebut merupakan bagian yang melekat pada kajian penelitian kali ini. Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh dan didukung oleh aktivitas observasi ditemukan bahwa implementasi pembelajaran PKN berkarakter dilakukan berdasarkan tiga tahapan yakni:

Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan aktivitas awal yang dilakukan guna menentukan dan merancang kegiatan yang akan dijalankan (Rohman et al., 2022). tahap perencanaan menduduki posisi central dalam rangka mencapai tujuan suatu program (Isma et al., 2022). Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh, diketahui bahwa dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKN, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan. Pada tahapan ini, pembelajaran dirancang khusus dan tertuang dalam RPP yang akan digunakan dalam pembelajaran. Melalui RPP pula guru menuangkan ide dan gagasan yang diintegrasikan melalui model dan media pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Hal ini senada dengan penuturan guru mata pelajaran PKN yang menyebutkan bahwa:

“setiap program yang akan kami jalankan selalu direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan yang matang akan memudahkan kami dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar. Perencanaan menjadikan kami mudah dalam merefleksikan program yang dijalankan gar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ya seperti pada umumnya, perencanaan tersebut dituangkan dalam RPP pembelajaran. RPP itulah yang menjadi panduan kami dalam mengajar.” (wawancara guru pada 26 februari 2019)

Diketahui bahwa melalui RPP guru akan lebih mudah dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dengan kata lain RPP merupakan produk yang dihasilkan dalam tahap perencanaan. RPP inilah yang nantinya akan menjadi kunci berhasilnya pelaksanaan pembelajaran.



Gambar 1

Wawancara dengan guru pelajaran PKN MI Nurul Ummah Yogyakarta
(Dokumentasi Rohman, 26 februari 2019)

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi merupakan tahap ke dua yang dilakukan guru dalam rangka mengintegrasikan pembelajaran PKN dengan nilai-nilai karakter. Pada tahap pelaksanaan integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PKN dilakukan berdasarkan dua cara yakni:

- a. Metode pembiasaan

Metode pembiasaan merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan cara melakukan aktivitas kebiasaan rutin berkenaan dengan nilai karakter yang ingin ditanamkan (Anggraeni et al., 2021). Salah satu aktivitas yang dilakukan dengan metode pembiasaan adalah karakter disiplin, patuh, jujur, bertanggung jawab dan lain-lain.

b. Metode keteladanan

Keteladanan memiliki arti pemberian contoh langsung kepada peserta didik sesuai dengan karakter yang ingin ditanamkan (Cahyaningrum et al., 2017). Metode keteladanan mengharuskan guru memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum ia meminta siswa menerapkan karakter tersebut. Pemberian keteladanan atau contoh bersifat kontiniu dan terus menerus dan bukan hanya sekali. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui metode keteladanan berupa disiplin tepat waktu, hidup bersih, gotong royong dan lain sebagainya.

Tahap Evaluasi

Tahap selanjutnya yang tak kalah penting adalah evaluasi. Evaluasi merupakan aktivitas menilai seluruh rangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dengan tujuan (Mahmudi, 2011) melihat sejauh mana tingkat keberhasilan penanaman nilai karakter melalui pembelajaran PKN. Aktivitas evaluasi dapat dilakukan dengan tiga aspek penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilihat dari aktivitas keseharian siswa baik dalam kondisi belajar maupun di luar pembelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes yang diberikan kepada peserta didik baik berupa tes tulis maupun tes lisan. Sedangkan penilaian keterampilan dirilihat berdasarkan perilaku peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang telah diajarkan berdasarkan metode tertentu. Selain itu penilaian keterampilan juga dapat diambil berdasarkan portofolio peserta didik berkenaan dengan nilai karakter tersebut (Azkia & Rohman, 2020).

SIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai bagian dari proses upaya membangun cara hidup multicultural untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran bela negara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Jika dikaitkan dengan pendidikan karakter, konsep materi dalam pembelajaran PKN memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu sudah seharusnya pembelajaran PKN dapat memunculkan nilai-nilai karakter dalam setiap aktivitas pembelajaran. Melalui konsep tersebut, MI Nurul Ummah secara langsung telah melaksanakan koridor tersebut. Dalam rangka mengimplementasikan nilai karakter melalui pembelajaran PKN, MI Nurul Ummah Yogyakarta melakukan beberapa tahapan yakni: Pertama tahap perencanaan yang meliputi penyusunan RPP dan Silabus, ke dua pelaksanaan dengan menggunakan metode keteladanan dan pembiasaan, dan ke tiga evaluasi berdasarkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, C., Elan, E., & Mulyadi, S. (2021). Metode Pembiasaan Untuk Menanamkan Karakter Disiplin Dan Tanggungjawab Di Ra Daarul Falaah Tasikmalaya. *Jurnal Paud Agapedia*, 5(1), 100–109.
- Azkia, N., & Rohman, N. (2020). Analisis Metode Montessori Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas Rendah Sd/Mi. *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 1–14.
- Cahyaningrum, E. S., Sudaryanti, S., & Purwanto, N. A. (2017). Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembiasaan Dan Keteladanan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 203–213.

- Darmadi, H. (2020). *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Ppkn): Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa*. An1image.
- Duryat, H. M. (2021). *Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi Dalam Berkontestasi Di Bidang Pendidikan*. Penerbit Alfabeta.
- Fitria, M. R. (2011). *Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Di Sman 1 Malang* [Phd Thesis]. University Of Muhammadiyah Malang.
- Fitriyani, P. (2018). Pendidikan Karakter Bagi Generasi Z. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (Appptma)*. Jakarta, 23–25.
- Hamidah, H. (2019). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Forum Paedagogik*, 10(1), 27–39.
- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Indonesia, R. (1989). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Mimbar Hukum*, 6(1989).
- Isma, C. N., Rohman, N., & Istiningih, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Minat Baca Siswa Kelas 4 Di Min 13 Nagan Raya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 7932–7940.
- Juliardi, B. (N.D.). *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 8.
- Karimah, M. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Madrasah Salafiyah Ibtidaiyah. *Indonesian Journal Of Curriculum And Educational Technology Studies*, 3(1), 49–55.
- Kurniati, P., Putra, H. M., Komara, L. S., Wibianika, H., & Setiansyah, R. (2021). Budaya Kewarganegaraan, Praktek Kewarganegaraan Dan Pendidikan Untuk Kewarganegaraan Demokratis. *Jurnal Ilmiah P2m Stkip Siliwangi*, 8(2), 107–115.
- Kurniawan, M. I. (2013). Integrasi Pendidikan Karakter Ke Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Sekolah Dasar (Jp2sd)*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v1i1.1528>
- Mahardika, I. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme Mahasiswa Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. *Pelita Bumi Pertiwi*, 2(02), 8–16.
- Mahmudi, I. (2011). Cipp: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1).
- Nasution, T. (2017). Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Siswa. *Ijtimaiah: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2).
- Nurjanah, I. J., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9435–9439.
- Rohman, N. (2021). Analisis Teori Behaviorisme (Thorndike) Pada Pelajaran Matematika Dan Bahasa Indonesia Sdn Upt XVII Mukti Jaya Aceh Singkil. *Abdau: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 223–236.
- Rohman, N., Istiningih, I., & Hasibuan, A. T. (2022). Analisis Kesiapan Mengajar Mahasiswa Prodi Pgmil Melalui Program Pengayaan Keterampilan Mengajar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 790–798.
- Sadeli, E. H. (2016). Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Melek Politik Siswa Sma Negeri 2 Purwokerto. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan Uud 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Setiawan, D. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 61–72.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia.

- Wahono, M. (2018). Pendidikan Karakter: Suatu Kebutuhan Bagi Mahasiswa Di Era Milenial. *Integralistik*, 29(2), 145–151.
- Winarno, W. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, Dan Penilaian. *Jakarta: Bumi Aksara*.